



Pembangunan Sistem Electronic-Government dalam mensukseskan Program Visit Wonderful Bengkulu 2020

Arius Satoni Kurniawansyah¹, Rizka Tri Alinse²

^{1,2} Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dehasen Bengkulu, Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Bengkulu

Email: ¹ariussatoni@unived.ac.id, ²rizkatri07@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan akan eGovernment adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan masyarakat. Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi dewasa ini sangat mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic-government (e-Gov)* yang mulai diterapkan di Indonesia dan di beberapa daerah. Tahapan metode penelitiannya adalah Permohonan izin untuk penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dehasen Bengkulu, Permohonan Izin untuk penelitian dari Kantor pelayananan terpadu Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Seluma, Pengumpulan data Pemerintahan baik yang masih manual maupun yang sudah terkomputerisasi, Pengelompokan data Pemerintahan yakni Nama Program Unggulan Daerah, Target Capaian, Kondisi Keuangan Pada Tahun 2019. Program pembangunan lintas sektoral guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Seluma yang unggul dan sejahtera dengan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk wisata serta sektor unggulan dan optimalisasi produk unggulan. Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan Good Governance adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik atau *electronic government (e-government)*. Pengelolaan lembaga/instansi secara elektronik baik untuk swasta maupun pemerintahan selain meningkatkan transparansi, juga bisa meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas/meningkatkan daya hasil).

Kata Kunci: Electronic-Government, Sistem, Pemerintahan, Transparan, Wonderful

ABSTRACT

The need for eGov is the use of information and telecommunications technology for efficient and effective government administration, as well as providing transparent and satisfying public services. The integration of technology and information systems today greatly influences public institutions such as local governments and the Central Government. The current regional government system has begun to be integrated in a technology that can be controlled from the central government. An example is the application of electronic-government (e-Gov) which began to be implemented in Indonesia and in several regions. The stages of the research method are Application for permission for research from the Research and Community Service Institute of Dehasen University Bengkulu, Application for Permit for research from Bengkulu Province and Seluma Integrated Service Offices, Collection of Government data both manual and computerized, Government data grouping namely Name Regional Superior Program, Achievement Targets, Financial Conditions in 2019. Cross-sectoral development program to create superior and prosperous Seluma District people by improving infrastructure, facilities and infrastructure, including tourism and leading sectors and optimizing superior products. One solution and alternative that promises to create transparency in realizing Good Governance is an electronic government (e-government) government management system. Management of institutions / agencies electronically for both private and government in



addition to increasing transparency, can also increase efficiency (reduce costs and increase effectiveness / increase yield).

Keywords: Electronic-Government, System, Governance, Transparent, Wonderful

1. Pendahuluan

Peranan pemerintah dalam memberikan sebuah layanan terhadap masyarakat menjadi prioritas, hal ini menjadikan berbagai fasilitas layanan yang digunakan oleh pemerintah selalu mengedepankan kepuasan pelayanan, efektifitas pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaannya. Hal inilah yang menjadikan pemerintah selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan, salah satunya adalah dengan membuat suatu sistem berbasis teknologi informasi secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah adalah membangun sebuah konsep *e-Government* pada setiap tingkatan instansi pemerintah.

E-Government merupakan sebuah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan secara efisien yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lain. *E-Government* adalah sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Setia, Yunas Novi: 2015). Standarisasi dalam pengelolaan *e-government* di Indonesia sudah mulai distandarisasi untuk mendapatkan sebuah system *e-Government* yang terbaik sehingga keberadaannya menjadi salah satu bentuk dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung administrasi pemerintahan mulai dari bagaimana menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen*), pemerintah dengan kalangan bisnis (*Government to Business*), serta pemerintah dengan instansi pemerintah. Selain itu standarisasi *e-Government* menjadi lebih detail dengan mengacu kepada standarisasi model data dan *interface* yang akan diimplementasikan. Permasalahan yang timbul pada saat pembuatan program sebagaimana diuraikan pada latar belakang di atas adalah bagaimana membangun sebuah Sistem Electronic- Government di Kabupaten Seluma.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Eelectronic-Government

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Somantri, oman dkk : 2017). Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C).

2.2 Fungsi dan Perkembangan E-Government

E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu e-government juga



bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

Perkembangan e-government di Indonesia masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Indonesia belum mencapai tingkat integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Melihat perkembangan system aplikasi e-government di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government di Indonesia masih dalam proses. Artinya pengembangan e-government dapat dikatakan sukses ataupun sebaliknya gagal di masa yang akan datang. Penting untuk mempersiapkan berbagai sarana dalam pengembangan e-government di Indonesia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi dan inisiatif serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat langsung agar inisiasi untuk menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik dan pelayanan yang berkualitas dapat terwujud dengan baik bukan pelaksanaan yang terkesan dituntut oleh kebijakan pemerintah pusat.

2.3. Hubungan E-Government dengan Good Governance

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Buah dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif merealisasikan peranannya dalam melayani masyarakatnya.

Secara umum pengimplementasian e-government diyakini akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia dan rendahnya kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas manajemen pemerintahan Indonesia. Karena itu, diperlukan suatu manajemen pemerintah yang sangat menonjolkan unsur transparansi, sebagai salah faktor penting untuk menghilangkan KKN (kolusi, kompsi, nepotisme) di pemerintahan. Rendahnya transparansi ini menyebabkan sukarnya mekanisme pengawasan berjalan dengan lancar (Suprianto, Edy :2014).

Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik atau electronic government (e-government). Pengelolaan lembaga / instansi secara elektronik baik untuk swasta maupun pemerintahan selain meningkatkan transparansi, juga bisa meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas/meningkatkan daya hasil).

2.4 Pemerintahan Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diwilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk

berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS – 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT – 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebelah Barat dengan Samudra Hindia. Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai (Musrenbang, Pemkab Seluma :2019).

2.5 Pemerintahan yang Baik

Konsep Governance menurut stoker (1998) merujuk pada gaya pemerintah dimana batas antara dan diantara sector public dan sector privat menjadi kabur. Pengaburan ini sejalan dengan kebutuhan dari Negara-negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan atas pentingnya isu-isu menyangkut perasaan dan empati dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik. Hal ini yang membuat partisipasi melalui pembangunan jejaring antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan (Suprianto, Edy :2014). Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan antara yang baik dan yang buruk. Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan diantaranya adalah : 1). Pemerintah di harapkan bersikap proaktif terhadap peluang-peluang ekonomi positif 2). Perubahan demografi dibanyak negara telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi kerja 3). Sektor publik harus berhadapan dengan seperangkat harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikan lebih memiliki informasi 4). Harapan dari pegawai yang lebih optimis 5). Ketersediannya teknologi informasi dan komunikasi modern.

3. Metode Penelitian

3.1. Data identitas subjek

Untuk mendapatkan jumlah subjek yang diperlukan, peneliti melakukan pencacahan terhadap data Pemerintahan yang ada di Kabupaten Seluma. Subjek penelitian memiliki kriteria inklusi yang telah ditetapkan, selanjutnya subjek yang memenuhi kriteria akan dijadikan sebagai data penelitian.

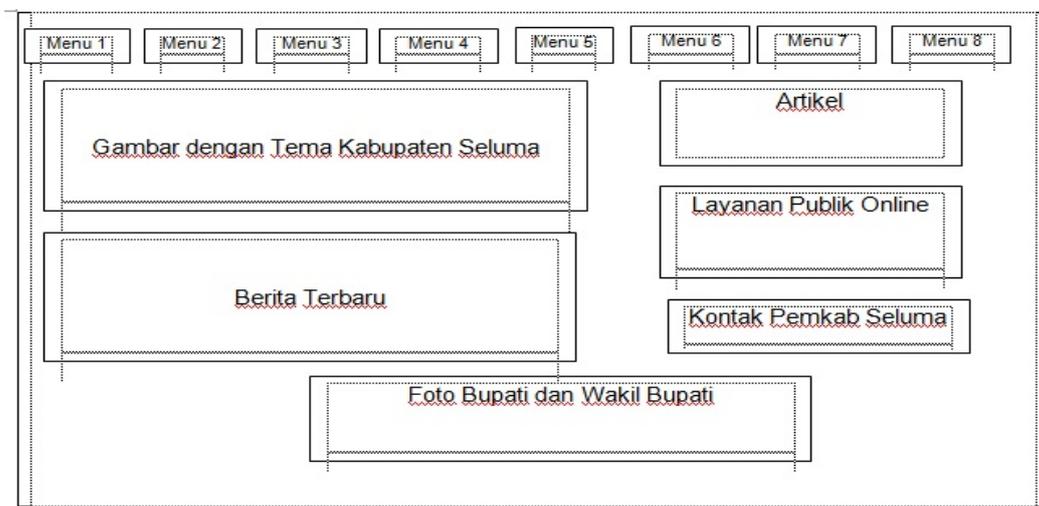
3.2. Data karakteristik subjek

Data karakteristik subjek meliputi Nama Program Unggulan Daerah, Target Capaian, Kondisi Keuangan yang diperoleh dengan meminta data Pemerintahan secara lengkap kepada Pemkab Seluma.

Untuk mendapatkan jumlah subjek yang diperlukan, peneliti melakukan pencacahan terhadap data Pemerintahan yang ada di Kabupaten Seluma. Subjek penelitian memiliki kriteria inklusi yang telah ditetapkan, selanjutnya subjek yang memenuhi kriteria akan dijadikan sebagai data penelitian.

3.3. Rancangan Sistem

Adapun Rancangan Sistem Electronic-Government yang akan dibangun untuk Pemerintah Kabupaten Seluma adalah seperti gambar berikut ini :



Gambar 1. Rancangan Sistem E-Government Pemkab Seluma

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemerintahan Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di wilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS – 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT – 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, Sebelah Barat dengan Samudra Hindia



Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan e-Government menentukan prioritas pengembangan e-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C) (Hartono, dkk. :2010).

E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk pemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. e-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah (Suprianto, Edy : 2014).

Di Indonesia perkembangan e-government masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Indonesia belum mencapai tingkat integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Melihat perkembangan sistem aplikasi e-government di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government di Indonesia masih dalam proses. Artinya pengembangan e-government dapat dikatakan sukses ataupun sebaliknya gagal di masa yang akan datang. Penting untuk mempersiapkan berbagai sarana dalam pengembangan e-government di Indonesia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi dan inisiatif serta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat langsung agar inisiasi untuk menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik dan pelayanan yang berkualitas dapat terwujud dengan baik bukan pelaksanaan yang terkesan dituntut oleh kebijakan pemerintah pusat (Suprianto, Edy : 2014).

4.2. Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi. Dalam hukum administrasi, negara-negara anggota Uni Eropa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah membahas prinsip-prinsip *Good Governance* dikaitkan dengan hukum administrasi Eropa. Telaah hukum administrasi berkenaan dengan fungsi dan pendekatan dalam hukum administrasi, jelaslah menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan

kekuasaan memerintah bertumpu atas *rechtmatigheid* (asas legalitas). Pengujian segi legalitas atau segi *rechtmatigheid* terutama merupakan fungsi judicial control (bandingkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jsi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009).

Karakteristik tata pemerintahan yang baik atau *good governance* apabila dapat diterapkan dalam penegakan hukum tentang korupsi melalui system peradilan korupsi, maka tujuan reformasi hukum dan keadilan di Indoensia niscaya akan terwujud secara simultan. Semua sangat tergantung pada sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum. Terkait dengan persoalan demikian, terdapat pandangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, aparatur negara (penegak hukum) harus mengindahkan dan dibatasi asas-asas diantaranya, pertama asas *rehctmatigheid* (yuridikitas), kedua asas *wetmatigheid* (legalitas), ketiga asas *ermessen* (diskresi), baik yang bersifat bebas maupun yang terikat, dan yang terakhir the general principle of good administration (asas-asas umum pemerintahan yang baik), yang terdiri dari 12 asas, yakni: *principle of certainty* (asas kepastian hukum), *principle of proportionality* (asas keseimbangan), *principle of equality* (asas kesamaan), *principle of carefulness* (asas bertindak cermat), *principle of motivation* (asas motivasi setiap keputusan), asas *principle of non misuses of competency* (tidak mencampuradukan kewenangan), *principle of affair play* (asas percaturan yang layak), asas *principle of reasonableness of prohibition of arbitrariness* (keadilan atau kewajaran), asas *principle of undoing the consequences raised expectation* (meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal), asas *principle of protecting the personal way of life* (perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup pribadi), asas *principle of sapientation/policy* (kebijaksanaan), asas *principle of public service* (Somantri, oman dkk: 2017).

Adapun Program Pemkab Seluma tahun 2019 adalah Program pembangunan lintas sektoral guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Seluma yang unggul dan sejahtera dengan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk wisata serta sektor unggulan dan optimalisasi produk unggulan (Musrenbang, Pemkab Seluma:2018).

Setelah dirancang dan dibuat, maka tampilan E-Government Pemerintah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tampilan E-Government Pemkab Seluma



5. Kesimpulan

Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik atau *electronic government* (e-government). Pengelolaan lembaga/instansi secara elektronik baik untuk swasta maupun pemerintahan selain meningkatkan transparansi, juga bisa meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas / meningkatkan daya hasil).

6. Persembahan

Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat-Kemenristek Dikti Republik Indonesia.
Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2019.

7. Referensi

Hartono, dkk, 2010. “Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web”. Semarang, Universitas Dian Nuswantoro

Musrenbang, Pemkab Seluma Akan Terima Bantuan Anggaran. Diakses tanggal 21 Juni 2019. <https://www.tuntasonline.com/2019/03/20/musrenbang-pemkab-seluma-akan-terima-bantuan-anggaran>

Setia, Yunas Novi. “*Perkembangan e-Government di Indonesia*” . diakses pada 20 November 2015 : http://www.academia.edu/8402067/PERKEMBANGAN_E-GOVERNMENT_DI_INDONESIA

Somantri, oman dkk, Implementasi *e-Government* Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA), *Jurnal Jurnal Informatika:Jurnal Pengembangan IT (JPIT)* , Vol. 2, No. 1, Januari 2017 ISSN: 2477-5126, e-ISSN: 2548-9356

Suprianto, Edy. 2014. “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah”. Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang

Website Pemerintah Kabupaten Seluma, diakses pada 06 Agustus 2018 : <http://selumakab.go.id/sejarah-seluma/>